EVALUASI *EX ANTE* PENYUSUNAN ANGGARAN KEGIATAN MENUNJANG FUNGSI PENDIDIKAN DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

CHRICHE ANGELINA
NIM. 07011281621203

Konsentrasi Keuangan Negara Dan Fiskal

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JANUARI 2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

EVALUASI EX ANTE PENYUSUNAN ANGGARAN KEGIATAN MENUNJANG FUNGSI PENDIDIKAN DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

SKRIPSI

Oleh:

CHRICHE ANGELINA

07011281621203

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, **24 November 2020**

Pembimbing I

Dr. Lili Erina, M.SI
NIP. 196612301992032001

Pembimbing II

Dwi Mirani, S.IP., M.SI
NIP. 198106082008122002

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Evaluasi Ex Ante Penyusunan Anggaran Kegiatan Menunjang Fungsi Pendidikan Di Sumatera Selatan Tahun 2020*" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 11 Januari 2021.

Indralaya,11Januari 2021

Ketua

1. Dr. Lili Erina, M.Si
   NIP. 196612301992032001

Anggota

2. Dwi Mirani, S.Ip., M.Si
   NIP. 198106082008122002

3. Sofyan Effendi, S.Ip., M.Si
   NIP. 197705122003121003

4. Dr. Martina, M.Si
   NIP. 196603051993022001

Mengetahui,

Dekan FISIP	Ketua Jurusan Administrasi Publik
Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si	Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 196311061990031001	NIP. 198108272009121002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Chriche Angelina

Nim : 07011281621203

Jurusan : Ilmu AdministrasiPublik

Konsentrasi : Keuangan Negara

Judul Skripsi : Evaluasi *Ex Ante* Penyusunan Anggaran Kegiatan Menunjang Fungsi Pendidikan Di Sumatera Selatan Tahun 2020

Alamat : Jalan Sapta Marga Rt. 53, Rw. 03, No. 004, Lorong Mushola, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni Kota Palembang

No. HP : 082186605138

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis di atas merupakan karya sendiri,disusun dari hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Apabila kelak terbukti bahwa skripsi saya di atas merupakan jiplakan karya orang lain (plagiatrisme) saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Indralaya, 29 Januari 2021

Yang membuat pernyataan

Chriche Angelina
NIM. 07011281621203

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Proses Demokrasi, kerja birokrasi, semua potensi, semua kekuatan harus diarahkan untuk membangun INDONESIA YANG MAJU INDONESIA YANG SEJAHTERA"
(Ir. H. Joko Widodo)

"Agama dan Nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan"
(KH. Hasyim Asy'ari)

Atas Ridha Allah SWT, Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

1. **Kedua orang tua saya, Bapak Sukiyatna dan Ibu Sri Neti**
2. **Kedua kakak saya Hestina dan Arif, dan Adik saya Sukma**
3. **Seluruh Dosen dan pegawai FISIP UNSRI**
4. **Rekan seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2016**
5. **Almamater kebanggaan saya**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa sesuai proses penyusunan anggaran kegiatan menunjang fungsi pendidikan di Sumatera Selatan tahun 2020 terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan dalam penyusunan anggaran pendidikan provinsi, serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri bahwa anggaran Fungsi Pendidikan di Sumatera Selatan belum memenuhi amanat undang-undang dan adanya potensi keterlambatan pembahasan Rancangan APBD tahun 2020. Model evaluasi yang digunakan untuk menganalisis evaluasi *ex-ante* pada penelitian ini adalah evaluasi CIPP menurut D.L. Stufflebeam dengan empat aspek yaitu analisis konteks, analisis input, analisis proses, dan analisis produk dalam proses penyusunan anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan anggaran kegiatan menunjang fungsi pendidikan di Sumatera Selatan tahun 2020 masih belum sesuai dengan peraturan-peraturan atau ketentuan dalam penyusunan anggaran pendidikan provinsi. Faktor pendukung dalam penyusunan APBD berbasis kinerja adalah tersedianya aplikasi *e-Sumsel* yang dapat mengelola keuangan berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja dan Aparatur mengikuti pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis. Faktor penghambat dalam penyusunan APBD berbasis kinerja adalah adanya keterlambatan pembahasan Rancangan APBD. Adapun saran penelitian ini yaitu BAPPEDA harus memperbaiki perhitungan alokasi fungsi pendidikan dengan menambahkan komponen anggaran Dinas kebudayaan dan anggaran Dinas Pariwisata dan membuat desain rancangan besar pendidikan di Sumatera Selatan, serta komitmen serius pemerintahan Sumatera Selatan dalam membahas APBD tepat waktu.

Kata Kunci: Model, Evaluasi, CIPP, APBD, Anggaran, Berbasis, Kinerja

Pembimbing I

Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001

Pembimbing II

Dwi Mirani, S.Ip., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, Januari 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This study aims to determine how appropriate the process of budgeting for activities to support the function of education in South Sumatra in 2020 against the regulations or provisions in the preparation of the provincial education budget, as well as supporting factors and inhibiting factors. This research is motivated by the evaluation results of the Ministry of Home Affairs that the education function budget in South Sumatra has not fulfilled the mandate of the law and the potential delay in discussing the 2020 APBD Draft. The evaluation model used to analyze the ex-ante evaluation in this study is the CIPP evaluation according to D.L. Stufflebeam with four aspects, namely context analysis, input analysis, process analysis, and product analysis in the budget preparation process. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the preparation of a budget for activities to support the function of education in South Sumatra in 2020 is still not in accordance with the regulations or provisions in the preparation of the provincial education budget. The supporting factor in the preparation of the performance-based APBD is the availability of an e-Sumsel application that can manage finances based on a Performance-Based Budget and Apparatus attend education, training, and technical guidance. The inhibiting factor in the preparation of the performance-based APBD is the delay in discussing the Draft APBD. The suggestion for this research is that BAPPEDA should improve the calculation of the allocation of education functions by adding a budget component of the Department of Culture and the Tourism Office budget and making a grand design for education in South Sumatra, as well as a serious commitment of the South Sumatra government in discussing the APBD on time.

Keywords: Model, Evaluation, CIPP, APBD, Budget, Based, Performance

Advisor I	Advisor II
Dr. Lili Erina, M.Si	**Dwi Mirani, S.Ip., M.Si**
NIP. 196612301992032001	**NIP. 198106082008122002**

Indralaya, Januari 2021
Chairman of the Departement of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis mengucapkan kepada Allah, berkat rahmat dan karunia Nya penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Derajat Sarjana Strata 1 Ilmu Administrasi Publik. Skripsi ini berjudul "Evaluasi Ex-Ante Penyusunan Anggaran Kegiatan Menunjang Fungsi Pendidikan Di Sumatera Selatan Tahun 2020".

Dalam menyelesaikan skripsi, penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. **Allah SWT** yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama penyusunan skripsi.
2. **Kedua Orang Tua** sebagai penyemangat terbaik yang tak pernah letih memberikan dukungan secara moril maupun material selama perkuliahan khususnya selama menyusun skripsi ini.
3. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. **Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. **Bapak Zailani Surya Marpaung S.Sos., MPA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
6. **Ibu Dr. Lili Erina, M.Si** selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah memberikan waktu untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan untuk membantu penyusunan skripsi ini
7. **Ibu Dwi Mirani, S.Ip., M.Si** selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan waktu untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan untuk membantu penyusunan skripsi ini, sekaligus membantu memperlancar proses akademik selama sembilan semester perkuliahan ini.
8. **Bapak Dr. H. Ir. Firmansyah, M.Sc** selaku Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. **Bapak H. Bakhnir Rasyid, SE., MM., M.Si** selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sudah berusaha maksimal dalam penyusunan skripsi ini. Apabila masih ada kekeliruan dalam penulisannya, penulis menerima kritik yang membangun. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis mengucapkan terima kasih.

Indralaya, Januari 2021

Chriche Angelina

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iv
ABSTRAK.....v
ABSTRACT.....vi
KATA PENGANTAR.....vii
DAFTAR ISI.....viii
DAFTAR TABEL.....x
DAFTAR GAMBAR.....xi
DAFTAR LAMPIRAN.....xii
DAFTAR SINGKATAN.....xiii
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....8
C. Tujuan Penelitian.....9
D. Manfaat Penelitian.....9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....10
A. Landasan Teori.....10
1. Sistem Penganggaran Pemerintah Daerah.....10
2. Evaluasi.....12
B. Penyusunan Anggaran Kegiatan Menunjang Fungsi Pendidikan Di Sumatera Selatan Tahun 2020.....14
C. Model Evaluasi Yang Digunakan Dalam Penelitian.....18
D. Penelitian Terdahulu.....19
E. Kerangka Pemikiran.....21
BAB III METODE PENELITIAN.....24
A. Jenis Penelitian.....24
B. Definisi Konsep.....24
C. Fokus Penelitian.....25
D. Unit Analisis Data.....27
E. Jenis Dan Sumber Data.....27
F. Informan Penelitian.....28
G. Teknik Pengumpulan Data.....28
1. Observasi.....28
2. Wawancara.....29
3. Dokumentasi.....30
H. Teknik Analisis Data.....30
1. Pengumpulan Data.....31

2. Reduksi Data 31
3. Penyajian Data 32
4. Penarikan Kesimpulan 32
I. Teknik Keabsahan Data.....32
1. Derajat Kepercayaan.....33
2. Keteralihan 33
3. Kebergantungan.....33
4. Kepastian.....34
J. Sistematika Penulisan.....34
BAB VI PEMBAHASAN.....36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....36
1. Sejarah Pembentukan BAPPEDA Provinsi Sumsel.....36
2. Letak Geografis BAPPEDA Provinsi Sumsel.....37
3. Visi Dan Misi BAPPEDA Provinsi Sumsel.....38
4. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi BAPPEDA Provinsi Sumsel.....41
5. Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Sumsel.....43
B. Gambaran Umum Kegiatan Menunjang Fungsi Pendidikan Di Sumatera Selatan.....45
C. Analisis Evaluasi Ex Ante Penyusunan Anggaran Kegiatan Menunjang Fungsi Pendidikan Di Sumatera Selatan Tahun 2020.....51
1. Analisis Hasil Evaluasi *Ex Ante* Pada Aspek Konteks Penyusunan Anggaran Kegiatan Menunjang Fungsi Pendidikan Di Sumatera Selatan Tahun 2020.....52
2. Analisis Hasil Evaluasi *Ex Ante* Pada Aspek Masukan Penyusunan Anggaran Kegiatan Menunjang Fungsi Pendidikan Di Sumatera Selatan Tahun 2020.....73
3. Analisis Hasil Evaluasi *Ex Ante* Pada Aspek Proses Penyusunan Anggaran Kegiatan Menunjang Fungsi Pendidikan Di Sumatera Selatan Tahun 2020.....80
4. Analisis Hasil Evaluasi *Ex Ante* Pada Aspek Produk Penyusunan Anggaran Kegiatan Menunjang Fungsi Pendidikan Di Sumatera Selatan Tahun 2020.....93
D. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Penyusunan Anggaran Kegiatan Menunjang Fungsi Pendidikan Di Sumatera Selatan Tahun 2020.....101
BAB V PENUTUP.....103
A. Kesimpulan.....103
B. Saran.....105
DAFTAR PUSTAKA.....108
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Rincian Perhitungan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Di Sumatera Selatan Tahun 2019..... 5
2. Penelitian Terdahulu.....20
3. Fokus Penelitian….....26
4. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2020.....46
5. Jumlah Festival Seni dan Budaya yang diselenggarakan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018.....48
6. Perhitungan Anggaran Belanja Langsung Fungsi Pendidikan Sumsel Tahun 2020.....62
7. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural Kepemimpinan.....66
8. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional.....67
9. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....75
10. Perhitungan Anggaran Fungsi Pendidikan Sumsel Tahun 2020.....96
11. Rekapitulasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.....97

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Kerangka Pemikiran..... 9
2. Analisis Data Model Interaktif Menurut Miles Dan Huberman..... 31
3. Tampak Luar Gedung Bappeda Provinsi Sumatera Selatan..... 38
4. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumsel.....44
5. Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.....59
6. Perumpunan Urusan Pemerintahan 60
7. Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Provinsi.....61
8. Format Perhitungan Alokasi Pendidikan.....63
9. Tampilan website *E-Planning* Sumsel.....68
10. Tampilan *E-Sumsel*.....69
11. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD.....70
12. Tampilan Menu Entri Data *E-Sumsel*.....76
13. Tampilan Entri Usulan OPD BTL Di *E-Sumsel*.....78
14. Rakorbangpus RKP 2020.....82
15. Penyampaian Arah Kebijakan tahun 2020 Oleh Gubernur Sumatera Selatan.....83
16. Forum Konsultasi Publik.....83
17. Musrenbang Provinsi.....84
18. Rapat membahas KUA dan PPAS APBD Sumatera Selatan tahun 2020.....87
19. Penandatanganan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020.....90
20. Entri Perhitungan Anggaran Fungsi Pendidikan Tahun 2020.....92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Surat Tugas.....111
2. Surat Permohonan Izin Penelitian Ke Bappeda Provinsi Sumsel.....112
3. Surat Izin Pengambilan Data Ke Kesbangpol Provinsi Sumsel.....113
4. Surat Balasan Dari Kesbangpol Provinsi Sumsel.....114
5. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi.....115
6. Lembar Revisi Seminar Proposal.....117
7. Kartu Bimbingan Skripsi.....119
8. Lembar Revisi Ujian Komprehensif.....121
9. Rincian Program Dan Kegiatan Bidang Pendidikan Di Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.....125
10. Rincian Program Dan Kegiatan Bidang Perpustakaan Di Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.....128
11. Rincian Program Dan Kegiatan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Di Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.....130
12. Rincian Program Dan Kegiatan Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Di Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.....133
13. Pedoman Observasi.....136
14. Pedoman Wawancara.....137
15. Tabel Hasil Dan Pembahasan Penelitian.....138
16. Permendagri Nomor 33 Tahun 2019.....141

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BAKOPDA	: Badan Koordinasi Pembangunan Daerah
BANGGAR	: Badan Anggaran
BL	: Belanja Langsung
BTL	: Belanja Tidak Langsung
BAPPEDA	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HIV/AIDS	: Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome
IMTAQ	: Iman dan Taqwa
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
JICA	: Japan International Cooperation Agency
JUKNIS	: Petunjuk Teknis
K/L	: Kementerian/Lembaga
KDH	: Kepala Daerah
KEMENDAGRI	: Kementerian Dalam Negeri
KORSUPGAH KPK	: Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
KPBU	: Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
MUSRENBANG	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
PERMENDAGRI	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PINA	: Pembiayaan Investasi Non APBN
PN	: Prioritas Nasional
PPAS	: Prioritas Plafon Anggaran Sementara
RAKORBANGPUS	: Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat
RAPERDA	: Rancangan Peraturan Daerah
RAPBD	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RENSTRA	: Rencana Strategis
RKA	: Rencana Kerja dan Anggaran
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RUU APBN	: Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TUPOKSI	: Tugas Pokok dan Fungsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran pemerintah (negara dan daerah) berbeda dengan anggaran swasta. Anggaran negara dan daerah merupakan instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu, politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai yaitu memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (pemerintah dan swasta), dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan.

Pemerintah Indonesia telah menyadari sangat pentingnya pendidikan, salah satu indikatornya adalah dengan telah disetujuinya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Khusus untuk APBD, regulasi pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari belanja daerah ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, yang merupakan peraturan terbaru dan digunakan untuk berlaku juga pada tahun anggaran selanjutnya.

Selanjutnya tahun anggaran 2020, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. RKP tahun 2020 disusun

dengan prinsip anggaran yang berfokus pada program, menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Tematik yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistik yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan. Integratif yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dapat dilihat dari peran kementerian atau lembaga atau daerah atau pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan. Spasial yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Pada penyusunan APBD harus melaksanakan prinsip-prinsip penyusunan APBD, salah satunya prinsip Taat Asas yaitu penyusunan APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya. Dalam penyusunan APBD Sumsel tahun 2020 berpotensi mengalami keterlambatan pembahasan berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bidang Pendanaan Pembangunan Bapak Yanuar Suhartono, ST, “Pembahasan terhambat di bulan November karena masih masa transisi DPRD yang baru dilantik di bulan Oktober. Mereka kan harus membentuk Tim Banggar dan lain-lain” (Hasil wawancara, 8 April 2020).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan APBD Sumsel tahun 2020 berpotensi mengalami keterlambatan, karena pembahasan APBD tahun 2020 diselesaikan oleh anggota dewan periode tahun 2019-2024 yang baru akan dilantik pada bulan Oktober 2020. Potensi keterlambatan pembahasan APBD tahun 2020 bersama DPRD Sumsel ini bisa berdampak pada keterlambatan pengesahan APBD Sumsel tahun 2020 atau dianggap tidak Taat Asas Penyusunan APBD.

Penyusunan anggaran fungsi pendidikan Sumsel tahun 2020 juga dianggap tidak memenuhi prinsip Taat Asas, dikarenakan hasil evaluasi dari pihak Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) bahwa APBD Sumatera Selatan tahun anggaran 2020 tidak mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai porsi yang diamanatkan oleh undang-undang yaitu urusan pendidikan tidak sampai sepuluh persen. Namun, dari perhitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumatera Selatan, justru menilai bahwa urusan pendidikan sudah mencapai tiga puluh tiga koma dua persen yang artinya penyusunan anggaran anggaran kegiatan menunjang fungsi pendidikan di Sumatera Selatan tahun 2020 telah mencapai persentase yang diamanatkan undang-undang. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bidang Pendanaan Pembangunan Bapak Yanuar Suhartono, ST,

> "Hasil evaluasi Kemendagri kemarin bahwa anggaran fungsi pendidikan Sumsel tahun 2020 belum sesuai dengan amanat undang-undang, tetapi menurut perhitungan kami sudah sesuai dengan amanat undang-undang bahwa fungsi pendidikan ini terdiri dari beberapa komponen dan sudah dialokasikan kami lebih dari tiga puluh tiga persen, karena kami menghitung berdasarkan Permendagri 33 ini sebagai standar Provinsi. Anggaran tahun lalu juga dikatakan seperti itu. (Hasil wawancara, 8 April 2020).

Perbedaan pendapat versi perhitungan alokasi anggaran pendidikan Sumatera Selatan yang dinilai oleh Kemendagri belum memenuhi amanat undang-undang antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan Kemendagri mengenai evaluasi anggaran fungsi pendidikan Sumsel ini dikatakan oleh Kepala Sub Bidang Pendanaan Pembangunan Bapak Yanuar Suhartono, ST kepada peneliti juga terjadi pada evaluasi APBD Sumsel tahun 2019. Menindaklanjuti permasalahan tersebut sebagai bahan penelitian penulis terkait alokasi anggaran fungsi pendidikan, berikut ini adalah Rincian Perhitungan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan di Sumatera Selatan tahun 2019 dengan menggunakan data APBD

Perubahan tahun 2019 yang berhasil diolah oleh penulis pada saat Kuliah Kerja Administrasi:

Tabel 1. Rincian Perhitungan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan di Sumatera Selatan Tahun 2019 (APBD Perubahan Tahun 2019)

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Dana (Rp)	
1	a. Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan	Rp	819.192.357.000
	b. Belanja Langsung diluar Dinas Pendidikan yang Menghasilkan Output Menunjang Pendidikan	Rp	3.407.852.000
	Program/Kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga	**Rp**	**2.700.000.000**
	1) Dukungan Pendirian Politeknik Olahraga Indonesia Jakabaring	Rp	70.000.000
	2) Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Rp	60.000.000
	3) Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)	Rp	50.000.000
	4) Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan	Rp	1.400.000.000
	5) Jambore Pemuda Daerah (JPD) Provinsi Sumatera Selatan	Rp	100.000.000
	6) Penghargaan Pemuda Berprestasi	Rp	70.000.000
	7) Kapal Pemuda Nusantara (KPN)	Rp	30.000.000
	8) Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda dan Mahasiwa	Rp	110.000.000
	9) Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	Rp	70.000.000
	10) Sarana Prasarana Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya	Rp	150.000.000
	11) Permassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Rp	90.000.000
	12) Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya (SONS)	Rp	150.000.000
	13) Pusat Pembinaan dan Pelatihan Pelajar (PPLP)	Rp	350.000.000
	Program/Kegiatan pada Dinas Perpustakaan	**Rp**	**690.652.000**
	14) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp	690.652.000
	Program/Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**Rp**	**17.200.000**
	15) Pembekalan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi mahasiswa	Rp	17.200.000
	Jumlah (a+b)	Rp	822.600.209.000
2	a. Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendidikan	Rp	965.110.991.000
	b. Belanja Tidak Langsung pada SKPD	Rp	1.472.547.586.000
	1) Hibah Sekolah Gratis	Rp	93.000.000.000
	2) Hibah Program Peningkatan Kualifikasi Guru	Rp	5.504.000.000
	3) Hibah Kuliah Gratis	Rp	37.959.386.000
	4) Hibah Dana BOS	Rp	1.335.084.200.000
	5) Kwarda Pramuka	Rp	1.000.000.000
	Jumlah (a+b)	Rp	2.437.658.577.000
3	Anggaran Fungsi Pendidikan (1+2)	Rp	3.260.258.786.000
4	Total Belanja Daerah	Rp	9.713.473.244.482
5	Rasio anggaran pendidikan (3:4) x 100%	34%	

Sumber: Diolah oleh Penulis.

Perhitungan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan di Sumatera Selatan tahun 2019 dengan menggunakan data APBD Perubahan tahun 2019 di atas dilakukan berdasarkan arahan dari Kepala Sub Bidang Pendanaan Pembangunan Bappeda Sumsel Bapak Yanuar Suhartono, ST. Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa anggaran fungsi pendidikan telah dialokasikan Pemerintah Sumatera Selatan dengan rasio tiga puluh empat persen yang artinya sesuai bahkan melebihi amanat undang-undang, yaitu anggaran fungsi pendidikan minimal harus dianggarkan pemerintah provinsi sebesar dua puluh persen. Namun, terjadi perbedaan pendapat pada evaluasi APBD Sumatera Selatan tahun 2019 oleh Kemendagri, yaitu menurut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengalokasian anggaran fungsi pendidikan Sumatera Selatan tahun 2019 telah memenuhi dua puluh persen, sedangkan menurut Kemendagri belum memenuhi amanat undang-undang. Kemendagri memiliki perhitungan yang berbeda dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan perhitungan alokasi anggaran pendidikan berdasarkan format Permendagri Nomor 33 tahun 2017. Selama melakukan perhitungan fungsi anggaran pendidikan Sumatera Selatan tahun 2019 tersebut, peneliti juga menilai anggaran kegiatan-kegiatan yang menunjang fungsi pendidikan yang merupakan salah satu komponen penting agar dapat menghitung alokasi anggaran Fungsi Pendidikan secara tepat belum berdasarkan prinsip anggaran berfokus pada program, disebabkan belum adanya rancangan besar pendidikan Sumatera Selatan sehingga dapat diketahui kemana arah pendidikan di Sumatera Selatan yang dapat berdampak langsung bagi masyarakat Sumatera Selatan.

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami perubahan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2016, sehingga Bappeda Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dalam lingkup perencanaan dan pengendalian pembangunan. Melalui peraturan baru ini, maka penyusunan APBD untuk tahun 2019 dilaksanakan oleh BPKAD Sumatera Selatan, dan Bappeda dapat melaksanakan fungsi pemantauan, evaluasi, dan penilaian atas perencanaan pendanaan pembangunan tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu evaluasi pada tahap perencanaan (*ex-ante*), evaluasi pada tahap pelaksanaan (*on-going*), dan evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (*ex-post*). Evaluasi pada tahap perencanaan (*ex-ante*) adalah evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi *ex-ante* juga dapat diartikan sebagai kegiatan evaluasi untuk melihat rasionalitas pilihan, target dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, maka berdasarkan masalah-masalah yaitu hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri bahwa anggaran fungsi pendidikan di Sumatera Selatan belum memenuhi amanat undang-undang dan adanya keterlambatan pembahasan Rancangan APBD Sumatera Selatan tahun 2020 dapat dinilai bahwa APBD Sumatera Selatan tahun 2020 tidak Taat Asas atau dalam evaluasi *ex-ante* belum sesuai dengan dokumen perencanaan, sehingga penulis tertarik

untuk melakukan penelitian evaluasi *ex-ante* penyusunan anggaran kegiatan menunjang Fungsi Pendidikan di Sumatera Selatan Tahun 2020.

Evaluasi *ex-ante* memerlukan model evaluasi CIPP perkembangan Stufflebeam yang terdiri dari empat aspek, yaitu konteks, masukan, proses, dan produk, dengan cara menganalisis evaluasi *ex-ante* pada tiap empat aspek tersebut dalam penyusunan anggaran, sehingga mampu menjelaskan keseluruhan proses penyusunan anggaran menunjang fungsi pendidikan di Sumatera Selatan tahun 2020 dengan baik, sehingga dapat menjelaskan kesesuaian penyusunan anggaran kegiatan menunjang fungsi pendidikan di Sumatera Selatan tahun 2020 terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan penyusunan anggaran pendidikan provinsi, serta faktor pendukung dan penghambat nya, sehingga membuat peneliti tertarik melakukan evaluasi *ex-ante* dengan menggunakan model evaluasi CIPP Stufflebeam yang dinilai peneliti mampu menghasilkan solusi-solusi yang tepat dalam penyusunan anggaran fungsi pendidikan Sumatera Selatan untuk tahun 2020.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian ini adalah "**Evaluasi *Ex Ante* Penyusunan Anggaran Kegiatan Menunjang Fungsi Pendidikan Di Sumatera Selatan Tahun 2020**", sehingga dapat dibahas dan ditindaklanjuti oleh BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana proses penyusunan anggaran kegiatan menunjang fungsi pendidikan di Sumatera Selatan tahun 2020 ?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pada proses penyusunan anggaran kegiatan menunjang fungsi pendidikan di Sumatera Selatan tahun 2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini antara lain:

1. Ingin mengetahui seberapa sesuai proses penyusunan anggaran kegiatan menunjang fungsi pendidikan di Sumatera Selatan Tahun 2020 terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan dalam penyusunan anggaran pendidikan provinsi.
2. Ingin mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pada proses penyusunan anggaran kegiatan menunjang fungsi pendidikan di Sumatera Selatan Tahun 2020 sebagai bahan mencari solusi yang tepat dalam melakukan penyusunan anggaran menunjang fungsi pendidikan di Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi civitas akademika yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, dan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi khususnya bagi pihak BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan dan pada umumnya masyarakat Sumatera Selatan, serta pihak-pihak lain yang umumnya membutuhkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*.Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

BPKP. 2005. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.* Jakarta: BPKP.

Fathoni, A. 2011. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Grasindo. 2017. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya*. Jakarta: PT. Grasindo.

Hariadi, P., Restianto, Y.E. & Bawono, I.R. 2013. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Ismail, M., Santosa, B.D. & Yustika, A.E. 2014. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

JICA. 2004. *JICA Guideline For Project Evaluation*. Japan: Office of Evaluation, Planning and Coordination Japan International Cooperation Agency.

Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UMP AMP YKPN.

Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: UI Press.

Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.

Singarimbun, Masri & Sofian, E. 2009. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Stufflebeam, D. & Zhang, G. 2017. *The CIPP Evaluation Model: How To Evaluate For Improvement and Accountability*. New York: The Guilford Press.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suparmoko. 2011. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE.

Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif.* Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.

Ulum, I. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Universitas Sriwijaya. 2016. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Indralaya: Universitas Sriwijaya.

Winarno, B. 2014. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.

Dokumen-dokumen Lainnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 tentang RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.

Internet

https://www.bappeda.sumselprov.go.id/, diakses pada tanggal 8 April 2019.

https://www.bappenas.go.id/, diakses pada tanggal 8 April 2019.

https://sumsel.bps.go.id/, diakses pada tanggal 14 Januari 2020.

http://dprd.sumselprov.go.id/, diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

https://beritapagi.co.id/2019/06/04/anggaran-pendidikan-dan-kesehatan-di-sumsel-belm-memenuhi-kuota-undang-undang.html, diakses pada tanggal 8 April 2019.

https://beritapagi.co.id/2020/02/16/evaluasi-apbd-sumsel-2020-pendidikan-tak-sampai 10-persen-kesehatan-tak-sampai-5-persen-sumsel-terancam-disanksi-html, diakses pada 1 Agustus 2020.

http://jurnalsumatra.com/ketua-dprd-sumsel-pastikan-tidak-bahas-apbd-2020/, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020.

https://www.rmolsumsel.com/read/2019/09/05/123276/APBD-Perubahan-Sumsel-2019 Naik-8,48-Persen-, diakses pada tanggal 15 Juni 2019.

https://sumeks.co/apbd-yang-terlambat/, diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

https://www.google.com/amp/s/sumsel.tribunnews.com/amp2019/11/28/pembahasan apbd-molor-banggar-dprd-sumsel-tak-mau-disalahkan, diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

https://youtube.be/ptCXN8mQphM, diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

Skripsi

Irawan, D. 2018. *Evaluasi Ex-Ante Pada Proses Penyusunan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013-2015*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka.

Markham, A. 2002. *Evaluasi Anggaran Belanja Daerah Ditinjau Dari Proses Penyusunan Dan Pengalokasian Di Pemkot Banjarmasin, 1995/1996-1999/2000*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada.

Jurnal

Sutami, H. 2017. Evaluasi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Singkawang. *Jurnal Ekonomi Daerah*, Vol. 5 No. 3.